PERAN SERTA PERKUMPULAN PEMUDA NUSANTARA JAWA SUMATERA (PENJARA) DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN PEMUDA NUSANTARA JAWA SUMATERA (PENJARA)

Satria Nanda⁽¹⁾, Nurhimmi Falahiyati⁽²⁾, Sahbudi⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Al-Washliyah (UNIVA), Medan

e-mail: nandasatria247@gmail.com, nurhimmi19@gmail.com, sahbudi12345@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2398>

ABSTRACT

One of the most scrutinized crimes in Indonesia is corruption. Corruption in the private sector is as severe as in the public sector, especially when business activities are linked to public sectors such as taxation, banking, and public services. The Nusantara Jawa Sumatera Association, known as "PENJARA," is an organization dedicated to preventing corruption in the regions of Java and Sumatra. This organization comprises committed members focused on the integrity of the Indonesian nation. The role of PENJARA in development activities, including efforts to prevent and eradicate corruption, is crucial as a social check to enhance public welfare and establish a professional, corruption-free bureaucracy. This study addresses the government's role in optimizing the prevention and eradication of corruption in Indonesia and how the youth organization PENJARA contributes to these efforts. The study reveals that government efforts in combating corruption face significant challenges, including synchronizing legislation, improving human resources, and digitization. PENJARA plays a vital role by conducting outreach, discussions, and dialogues with the public and government to prevent corruption and limit the opportunities for corrupt activities.

Keywords: Corruption; Prevention; Public Sector; Private Sector; PENJARA

ABSTRAK

Salah satu kejahatan yang paling banyak disoroti di Indonesia adalah korupsi. Korupsi di sektor swasta sama parahnya dengan korupsi di sektor publik, terutama ketika kegiatan bisnis terkait dengan sektor publik seperti perpajakan, perbankan, dan layanan publik. Perhimpunan Nusantara Jawa Sumatera, yang dikenal dengan nama "PENJARA", adalah sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mencegah korupsi di wilayah Jawa dan Sumatera. Organisasi ini terdiri dari anggota-anggota yang berkomitmen dan berfokus pada integritas bangsa Indonesia. Peran PENJARA dalam kegiatan pembangunan, termasuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sangat penting sebagai *social check* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari korupsi. Studi ini membahas peran pemerintah dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana organisasi kepemudaan PENJARA berkontribusi dalam upaya tersebut. Studi ini mengungkapkan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas korupsi menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan sumber daya manusia, dan digitalisasi. PENJARA memainkan peran penting dengan melakukan penjangkauan, diskusi, dan dialog dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah korupsi dan membatasi peluang terjadinya korupsi.

Kata kunci: Korupsi; Pencegahan; Sektor Publik; Sektor Swasta; PENJARA

3. Pendahuluan

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah Korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Chazawi, 2014).

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah hanya terjadi dalam pengelolaan dana negara oleh individu-individu di dalam pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD). Korupsi tidak pula terjadi secara kebetulan, tetapi korupsi terjadi merupakan rangkaian kejahatan yang telah direncanakan dengan cermat, dimulai sejak tahap perencanaan anggaran hingga pelaksanaan pekerjaan maupun saat pertanggungjawaban pekerjaan. Sejak tahun delapan puluhan, tokoh ekonomi terkemuka kita, Sumitro Djojohadikusumo, telah mengungkapkan bahwa tingkat kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara mencapai tiga puluh persen. Tingkat kebocoran yang tinggi tersebut terus berlanjut hingga saat ini (Surachmin and Cahaya, 2013).

Tindakan pencegahan korupsi dilakukan dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dan melibatkan partisipasi masyarakat. Upaya penyadaran terhadap masalah korupsi harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diamendemen oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 2018 tentang peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dan pemberian penghargaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Dapat dipastikan bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan badan usaha yang dimiliki oleh negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Atmasasmita, 2021).

Korupsi dalam sektor swasta juga tidak kalah buruknya dengan korupsi yang terjadi dalam sektor publik, terutama untuk bisnis yang berhubungan dengan sektor publik seperti perpajakan, perbankan, dan layanan publik. Penerapan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terhadap kasus korupsi yang jelas telah terbukti sering mengalami kesalahan dalam penerapannya, baik oleh jaksa, hakim, maupun penasihat hukum. Hal ini lebih rumit lagi jika pelaku korupsi adalah karyawan badan usaha milik negara, yang sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum.

Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan menyeluruh memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk generasi penerus bangsa yang masih muda. Alasan itulah yang penting mengapa “Penjara” harus dilibatkan adalah karena terkait dengan sejarah bangsa Indonesia, di mana dari era kolonial hingga era reformasi.

Untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif dan menyeluruh, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan, tidak terkecuali generasi muda sebagai penerus

bangsa. Alasan yang mendasar mengapa “Penjara” harus terlibat adalah karena peranan generasi muda tidak bisa lepas dari Sejarah bangsa ini, peranan pemuda sudah dimulai dari masa kolonial hingga era reformasi.

Perkumpulan Pemuda Nusantara Jawa Sumatera yang dikenal dengan istilah “Penjara” merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam pencegahan korupsi di Sumatera. Organisasi tersebut diisi oleh barisan pemuda yang mempunyai komitmen tinggi terhadap karakter pribadi bangsa Indonesia. Gerakan anti korupsi kelompok “penjara” secara berkesinambungan dan tidak hanya bertumpu pada kasus korupsi. Hal ini tentu menarik untuk diteliti, karena sebagian besar organisasi anti korupsi lainnya baru muncul ketika masalah korupsi muncul dan tak berapa lama gerakannya kemudian berhenti.

Peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan, hal itu tercermin dengan diberinya hak masyarakat untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2004).

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan peran serta Pemuda Nusantara Jawa Sumatera dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi?

Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi (Hamzah, 2010).

Istilah Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan “*corruptio*” dalam bahasa Latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”. “*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara “*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng (Yunara, 2012).

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain (Chaerudin et al., 2008).

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang

Pengertian Tindak Pidana Korupsi (Djaja, 2010):

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum Pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi merupakan spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara (Chaerudin et al., 2008).

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24..

Sayed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut (Chaerudin et al., 2008):

1) Korupsi Transaktif

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

2) Korupsi Ekstortif (Memeras)

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi di mana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyusunan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya,

kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.

3) Korupsi Nepotistik (Perkerabatan)

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

4) Korupsi Investif

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

5) Korupsi Suportif (Dukungan)

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

6) Korupsi Autogenik

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

7) Korupsi Defensif

Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya. Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terdapat dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu (Prayudi, 2010):

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
7. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
8. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
9. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
11. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
13. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
14. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
15. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
16. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
17. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
18. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
19. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
20. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
21. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
22. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).
23. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
24. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
25. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).
26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN

Definisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang memiliki seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contoh BUMN adalah Bank Negara Indonesia atau PT. BNI, yang dimiliki negara dengan kepemilikan saham sebesar atau lebih dari 51%, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Oleh karena itu, modal Bank tersebut dianggap sebagai bagian dari kekayaan negara, dan jika terjadi kerugian dalam pengelolaannya, hal tersebut dapat dianggap sebagai merugikan keuangan negara.

Pada umumnya sektor-sektor yang rawan penyimpangan dan merugikan keuangan negara yang dilakukan dalam lingkup BUMN, antara lain (Taufiq, 2023):

- a. Manipulasi kredit;
- b. Manipulasi penerbitan deposito dan penerbitan promes fiktif;
- c. Pemberian jaminan bank yang menyimpang dari prosedur;
- d. Pemberian kredit menyimpang dari prosedur dalam bank pemerintah;
- e. Manipulasi penerimaan BUMN baik dari hasil penjualan produk dan jasa;
- f. Harga / nilai kontrak terlalu tinggi (mark up dalam pengadaan barang dan jasa);
- g. Penetapan pemenang lelang tidak sesuai ketentuan yang berindikasi suap atau ditetapkan oleh pengurus atau pengawas pada bagian pengadaan barang dan jasa BUMN;
- h. Pembayaran fiktif;

4. Metode

Metode penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan (Narbuko and Achmadi). penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian difokuskan untuk mengumpulkan data empiris (Fajar and Achnad, 2010).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau Implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Analisis yang dilakukan

- i. Pemalsuan surat/dokumen sebagai sarana penyimpangan penggunaan modal BUMN;
- j. Manipulasi penggunaan barang/dana;
- k. Ketekoran kas;
- l. Manipulasi biaya pembebasan tanah;
- m. Penggunaan modal perseroan (BUMN) tidak sesuai ketentuan;
- n. Realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak yang merugikan perseroan (BUMN);
- o. Penggelapan uang;
- p. Manipulasi gaji pegawai (karyawan BUMN);
- q. Pungutan tidak sah;
- r. Penyalahgunaan biaya perjalanan dinas;
- s. Tidak melakukan pungutan uang negara/MPO yang menjadi kewajiban BUMN;

Penyalahgunaan wewenang dalam mengambil keputusan dalam BUMN.

dengan metode kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari hasil penelitian pustaka data (data sekunder) sehingga dapat diketahui Peran Pemuda Nusantara Jawa Sumatera (PENJARA) dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang ada di lapangan.

5. Hasil dan Pembahasan Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimal-kan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Salah satu langkah yang sangat penting dan mendesak yang harus dilakukan pemerintah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah melakukan sinkronisasi peraturan atau penataan regulasi, pembinaan sumber daya manusia, dan menerapkan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan.

1. Menyinkronisasikan perundang-undangan atau penataan regulasi
Sinkronisasikan peraturan-perundangan atau penataan regulasi, penyesuaian dan penyalarsan terkait dengan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250).
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*).
 - g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003).
 - h. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - i. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 127 TAHUN 1999 tentang pembentukan komisi pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara dan sekretariat jendral komisi pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara
2. Pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia)
Pembinaan sumber daya manusia sangat diperlukan agar masyarakat Indonesia mampu memahami upaya bagaimana cara pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif.
 - a. Memberikan pendidikan kepada masyarakat
Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 13 UU No. 30 tentang komisi pemberantasan korupsi adalah paradigma dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai factor kunci keberhasilan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Tujuan pengembangan di masyarakat pembelajaran pencegahan dan tindak pidana korupsi. meningkatkan pemahaman para pembelajar mengenai korupsi, agar dapat membangun kepedulian masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dinegara ini
 - b. Mensosialisasikan program pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana korupsi
Sosialisasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang isu-isu terkait korupsi serta untuk membangun kesadaran agar masyarakat turut aktif dalam upaya

pemberantasan korupsi. Metode sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk ceramah dan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

3. Digitalisasi Pemerintahan

Upaya digitalisasi dan teknologi di Indonesia sangatlah masif sekali sehingga diperlukan agar dapat memenuhi syarat apabila kita ingin mendorong digitalisasi dari semua layanan publik sebagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. digitalisasi sebagai sarana untuk pencegahan korupsi, salah satunya di bidang ekspor dan impor, pemerintah menyiapkan sistem digital yang telah terintegritas dalam hal ini merupakan amanat undang-undang No 32 Tahun 2022.

Ada empat faktor utama yang menyebabkan korupsi, yakni faktor politik, hukum, ekonomi dan birokrasi, serta faktor transnasional. Faktor politik menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana korupsi karena seringkali terdapat pengaruh *money* politik dalam berbagai peristiwa politik. Faktor hukum juga turut menyebabkan korupsi karena banyaknya ketidakjelasan dalam produk hukum, dengan pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara berbeda dan kecenderungan untuk membuat aturan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, faktor ekonomi dan birokrasi juga menjadi pemicu korupsi karena kekuasaan negara sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh pegawai pemerintah dan kroni-kroninya. Kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah seringkali tidak partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam implementasinya. Terakhir, faktor transnasional berkaitan erat dengan perkembangan hubungan ekonomi lintas negara yang seringkali menciptakan peluang bagi korupsi di dalam birokrasi pemerintahan. Penting untuk dicatat bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh

individu dengan kondisi ekonomi yang rendah, tetapi juga oleh individu yang kaya dan memiliki pendidikan tinggi (Handoyo, 2013).

Peran Serta Perkumpulan Pemuda Nusantara Jawa Sumatera (PENJARA) Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Perkumpulan Pemuda Nusantara Jawa Sumatera (PENJARA) merasa prihatin melihat kondisi negara saat ini banyak pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang sebagai penguasa dan masyarakat juga yang kurang paham bagaimana cara untuk membasmi pejabat-pejabat yang menindas rakyatnya. Pendiri perkumpulan PENJARA berkeinginan ada suatu lembaga yang dapat melindungi masyarakat sebagai payung hukum untuk membantu masyarakat yang tertindas dan juga sebagai sosial kontrol.

Pada tanggal 9 Desember 2021 membentuk lembaga yang disahkan oleh Kemenkumham dengan nama "Perkumpulan Pemuda Nusantara Jawa Sumatera" yang di singkat (PENJARA), dan ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2022. "Perkumpulan Pemuda Nusantara Jawa Sumatera" di mana tujuan PENJARA ini sebagai sosial kontrol dan juga dapat membantu masyarakat yang tertindas, masyarakat miskin atau yang terpinggirkan.

Organisasi PENJARA adalah entitas yang bertanggung jawab mengedukasi masyarakat serta memberikan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana agar mereka dapat kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir.

Organisasi PENJARA biasanya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana melibatkan berbagai elemen, termasuk petugas keamanan, psikolog, pekerja sosial, petugas medis, negara dan beroperasi sesuai dengan undang-undang

dan regulasi yang berlaku. Tujuan utamanya adalah memberikan keadilan, perlindungan, rehabilitasi, dan re-integrasi sosial bagi narapidana.

Tujuan dan Fungsi Organisasi PENJARA:, seperti rehabilitasi, pengawasan, dan reintegrasi sosial narapidana. Ini juga akan membahas bagaimana organisasi penjara mencapai tujuan ini melalui program-program dan kebijakan yang diimplementasikan.

Struktur Organisasi dan Manajemen: Penelitian dapat memaparkan bagaimana struktur organisasi penjara terbentuk dan beroperasi. Ini mencakup hierarki staf, tanggung jawab masing-masing bagian, serta bagaimana komunikasi dan koordinasi dilakukan di antara staf.

Program Pendidikan dan Pelatihan: Pembahasan dapat melibatkan program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada narapidana. Ini meliputi program pembelajaran formal, pelatihan kerja, keterampilan vokasional, serta upaya untuk meningkatkan keterampilan narapidana.

Dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial: Hasil penelitian mungkin membahas upaya rehabilitasi untuk membantu narapidana mengubah perilaku buruk mereka menjadi positif. Ini juga akan mencakup program reintegrasi sosial yang membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah bebas.

6. Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menghadapi tantangan besar dan menjadi ancaman serius. Upaya tersebut meliputi sinkronisasi perundang-undangan, pembinaan sumber daya manusia, dan digitalisasi pemerintahan. Sinkronisasi perundang-undangan mencakup

Kemudian dalam hal Kesejahteraan Narapidana: Penelitian dapat membahas kondisi kehidupan narapidana di dalam fasilitas penjara, termasuk aspek-aspek seperti pelayanan kesehatan, akses terhadap fasilitas kebersihan, dan kesejahteraan mental.

Tantangan dan Masalah: Penelitian dapat menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi organisasi penjara, seperti kelebihan kapasitas, kekerasan di dalam penjara, masalah kelembagaan, dan sebagainya.

Pengawasan dan Pengendalian: Penelitian juga mungkin membahas bagaimana pengawasan dan pengendalian dilakukan di dalam penjara untuk mencegah insiden keamanan dan pelanggaran.

Pengaruh terhadap Narapidana dan Masyarakat: Penelitian bisa mengulas dampak dari program-program dan kebijakan organisasi penjara terhadap narapidana dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk dalam konteks pencegahan kriminalitas dan re-integrasi sosial.

Rekomendasi dan Perbaikan: Akhirnya, hasil penelitian mungkin menyajikan rekomendasi untuk perbaikan dalam operasi dan program organisasi penjara, berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan.

penyesuaian regulasi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, seperti TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan berbagai undang-undang terkait korupsi. Pembinaan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi program kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap pemberantasan korupsi. Digitalisasi pemerintahan diterapkan sebagai upaya untuk

meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik, yang diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi. Selain itu, peran Pemuda Nusantara Jawa Sumatera (PENJARA) dalam kegiatan penyuluhan, diskusi, dan dialog dengan masyarakat dan pemerintah juga sangat penting untuk membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi.

Pemerintah melalui lembaga-lembaganya diharapkan memberikan edukasi yang lebih intensif terkait pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi untuk memperkuat sistem penegakan hukum. Pendekatan ini harus mencakup upaya substansi perundang-undangan serta struktur penegak hukum dengan mempertimbangkan budaya hukum masyarakat. Selain itu, Perkumpulan PENJARA dan pemerintah perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dalam pemberantasan korupsi. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui penguatan posisi tawar Perkumpulan, baik dalam pembuatan regulasi terkait maupun dalam upaya pemberantasan korupsi.

Daftar Pustaka

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. (2004). *Pengkajian masalah hukum penanggulangan tindak pidana korupsi*. Jakarta.

Chaerudin, DKK. (2008). *Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*. PT Refika Aditama.

Chazawi, A. (2014). *Hukum pidana 1*. PT Raja Grafindo.

Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2010). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana*

nasional dan internasional. PT Raja Grafindo Persada.

Handoyo, E. (2013). *Pendidikan anti korupsi*. PT Raja Grafindo Persada.

Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). *Metode penelitian*. PT Bumi Aksara.

Prayudi, G. (2010). *Tindak pidana korupsi dipandang dalam berbagai aspek*. Pustaka Pena.

Taufiq, M. (2023). *Kejahatan korporasi*. Pustaka Pelajar.

Yunara, E. (2012). *Korupsi & pertanggungjawaban pidana korporasi (berikut studi kasus)*. PT Citra Aditya Bakti.

Fajar, M. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan hukum empiris*. Pustaka Pelajar.

Atmasasmita, R. (2021). *Hukum dan penegakan hukum*. CV Mandar Maju.

Surachmin, & Suhandi, C. (2013). *Strategi dan teknik korupsi: Mengetahui untuk mencegah*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 239).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.